



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN BENGKALIS
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2029



KecamatanBengkalis



KecamatanBengkalis



<https://camatbengkalis.bengkalis.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029. Dokumen ini disusun sebagai upaya untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan bagi Kecamatan Bengkalis.

Penyusunan rencana strategis ini merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terus berkembang di tingkat lokal. Dalam konteks ini, kami berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, serta menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Rencana ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Dokumen ini mencakup analisis situasi, penetapan visi dan misi, serta strategi dan program yang akan dilaksanakan dalam periode 2025-2029. Kami berharap, melalui rencana ini, Kecamatan Bengkalis dapat tumbuh dan berkembang menjadi daerah yang lebih baik, mandiri, dan sejahtera.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kecamatan Bengkalis dan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.



Bengkalis, 01 Mei 2025

CAMAT BENGKALIS,

TAUFIK HIDAYAT, S.STP., MPA
PEMBINA TK.I

NIP. 19821205 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan Renstra	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	34
2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	35
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.2.2. Isu Strategis	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	37
3.1. Tujuan dan Sasaran	37
3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis	38
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan	39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	41
4.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	59
BAB V PENUTUP	61

Bab ini Memberikan Gambaran
Tentang Latar Belakang Penyusunan,
Dasar Hukum Penyusunan, Maksud
dan Tujuan, serta Sistematika Renstra
Kecamatan Bengkalis

I**1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bengkalis tahun 2025-2029 bertujuan untuk mengarahkan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, dan strategi untuk mencapai visi pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang mengatur arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam periode lima tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Renstra berfungsi untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan daerah. Ini juga membantu dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Proses penyusunan Renstra melibatkan analisis situasi, identifikasi masalah, penetapan tujuan, serta penyusunan program dan kegiatan. Keterlibatan berbagai *stakeholder*, termasuk masyarakat, sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun relevan dan responsif terhadap kebutuhan.

Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) serta Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini memastikan bahwa semua rencana pembangunan terintegrasi dan mendukung pencapaian tujuan yang lebih luas. Renstra berkaitan erat dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Renstra dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Renja berfungsi sebagai alat untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga dapat memastikan bahwa setiap langkah

yang diambil sejalan dengan misi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Dengan latar belakang ini, diharapkan Rencana Strategis Kecamatan Bengkalis 2025-2029 dapat menjadi panduan yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat karakter masyarakat melalui nilai-nilai agama dan budaya Melayu.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bengkalis tahun 2025-2029 berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut adalah penjelasan mengenai dasar hukum yang relevan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
19. \Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah

Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Bengkalis 2025-2045.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bengkalis bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Selain itu, Renstra juga berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Serta Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat, Kelompok Sasaran Layanan, Serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menjelaskan Tentang Tujuan yang Hendak Dicapai, Indikator Kinerja Tujuan serta Target Kinerja Tujuan; Sasaran yang Hendak Dicapai, Indikator Kinerja Sasaran serta Target Kinerja Sasaran.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif, Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP
Menguraikan Tentang Kesimpulan Penting Substansial, Kaidah Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.

Bab ini Memberikan Gambaran
Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,
Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta
Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas pada kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka tugas pokok Pemerintah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat memiliki fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan dan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Adapun uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan dilingkungan Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dan melaksanakan urusan pemerintahan di kecamatan. Adapun fungsi Camat adalah:

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat/satuan organisasi kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kegiatan kecamatan dan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Penyusunan norma, standarisasi dan prosedur yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan administrasi umum meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, humas dan perlengkapan;
- e. Pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan, kelurahan dan desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari:

a) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas sub bagian penyusunan program, umum dan kepegawaian sebagai berikut:

- Merencanakan kegiatan sub bagian penyusunan program, umum dan kepegawaian berdasarkan data kegiatan program kegiatan kecamatan dan sub bagian penyusunan program berpatokan pada program dan kegiatan tahun sebelumnya, berdasarkan data yang ada;

- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan Program;
- Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mesistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), RENSTRA serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian;
- Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- Meneliti usulan permintaan formasi pegawai pegawai dilingkungan kecamatan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan kecamatan;
- Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan Kecamatan dan melakukan pendokumentasian kegiatan Kecamatan;

- Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
- Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut:

- Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan, perundang- undangan yang telah ditetapkan;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mesistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- Menginventarisir permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

- Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi, dan laporan kegiatan keuangan dinas;
- Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan asset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pemerintahan Kecamatan, pemerintah Kelurahan dan pemerintah Desa serta dibidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mesistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Tata Pemerintahan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Tata Pemerintahan;
- e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Tata Pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan menyiapkan analisa dan saran dalam rangkap penyelesaian perselisihan antar wilayah/Desa;
- g. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis hubungan koordinasi dan kerja sama antar pimpinan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya dalam Kecamatan;
- h. Melaksanakan urusan pembinaan pemerintahan umum, dan pembinaan desa dan Kelurahan diantaranya;
 - a) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - b) Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan Kelurahan;
 - c) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Lurah serta Perangkatnya.
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), fasilitasi penataan Desa dan Kelurahan

- dan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa serta fasilitasi dalam penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- j. Melaksanakan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan, Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD);
 - k. Melaksanakan pendataan, pembinaan administrasi kependudukan serta pemberian Rekomendasi dan Surat Keterangan dibidang kependudukan, seperti Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi Pasport dan lainnya;
 - l. Menyelenggarakan pembinaan keagrariaan dan pemberian surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan (SKGR, SKT, Hibah dan lainnya);
 - m. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas diwilayah Kecamatan;
 - n. Melaksanakan pembinaan politik dalam negeri diwilayah Kecamatan;
 - o. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (UPT) dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diwilayah Kecamatan;
 - p. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - q. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah (UPTD) dan instansi vertical dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
 - s. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
 - t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian,

produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas pemberdayaan masyarakat sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
- e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Mengkoordinir dan pendataan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi daerah diwilayah Kecamatan;
- g. Memberikan rekomendasi di bidang pertambangan dan energy serta bidang perekonomian lainnya;
- h. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan Monografi dan Profil Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
- i. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j. Memberikan dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- k. Melakukan pemantauan, pengawasan dan membuat surat pertanggungjawabannya terhadap penggunaan dana POD Desa dan melakukan evaluasi semua kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- m. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- n. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum dan desa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan- bahan

- lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas ketentraman dan ketertiban umum sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - f. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan gangguan (HO) dan rekomendasinya;
 - g. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan dan pemberian rekomendasi kecamatan;
 - h. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pemberian surat izin berkantor;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan polisi pamong praja kecamatan;
 - j. Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa di wilayah kecamatan;
 - k. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia atau Tentara Negara Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - l. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan dan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;

- m. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas seksi kesejahteraan sosial dan budaya sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi kesejahteraan sosial dan budaya dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi kesejahteraan sosial dan budaya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistемasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas kesejahteraan sosial dan budaya sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan seksi kesejahteraan sosial dan budaya;
- e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- f. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT LAM, dan peringatan HUT lainnya tingkat kecamatan;
- g. Merumuskan dan melaksanakan pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan JAMKESMAS kepada masyarakat;
- h. Melakukan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan Lembaga Adat serta suku terasing;
- i. Melakukan fasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- j. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi dan masalah sosial;
- k. Merumuskan dan menginventarisir dalam pelaksanaan pemberian RASKIN di wilayah kecamatan;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan sosial dan budaya sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

7. Seksi Pelayanan Umum

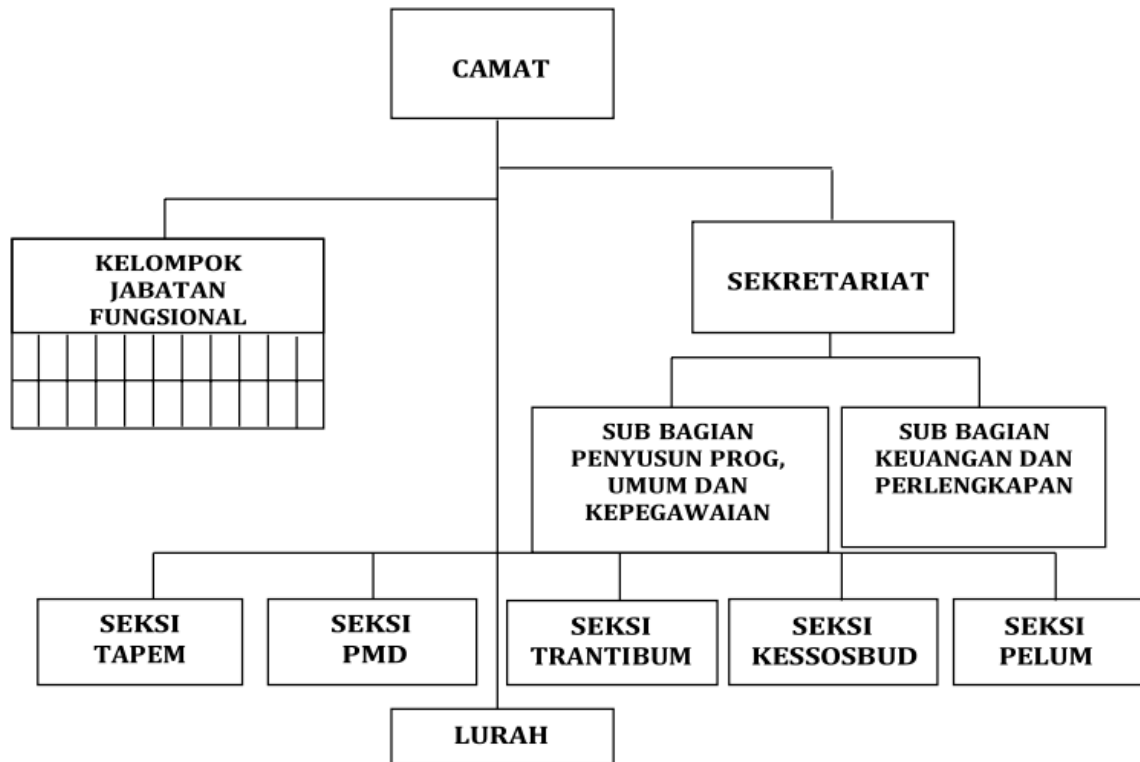
Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pelayanan umum, penggoodinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, PATEN di Kantor Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturanperundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan- bahan

lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dan landasan kerja;

- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Pelayanan Umum sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum;
- e. Melakukan pembinaan, mengkoordinir, mengevaluasi, mengawasi pelaksanaan PATEN di Kantor Camat;
- f. Melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Melakukan pendataan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosial, bantuan sosial dan budaya kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah kecamatan atau dengan instansi vertikal serta dengan swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan.

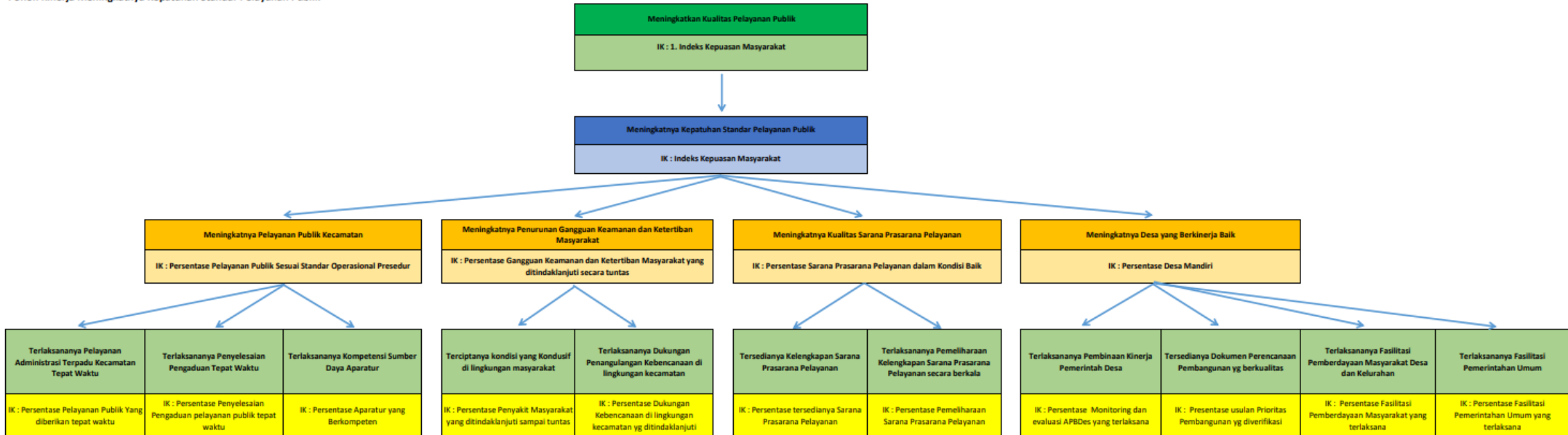
Struktur Organisasi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Pohon Kinerja Kecamatan Bengkalis

Pohon Kinerja Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik



Bengkalis, 01 Mei 2025

CAMAT BENGKALIS,

TAUFIK HIDAYAT, S.STP., MPA

PEMBINA TK.I

NIP. 19821205 200212 1 001

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Januari 2025, jumlah pegawai pada Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah 44 orang PNS dan Tenaga Kontrak sebanyak 49 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Jumlah PNS Kecamatan Bengkalis dan 3 Kelurahan Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	CAMAT	1	-	1
2	SEKRETARIAT			
	- SEKCAM	1	-	1
	- PPUK	2	1	3
	- KEUANGAN	2	1	3
3	SEKSI TAPEM	2	2	4
4	SEKSI KESOSBUD	1	-	1
5	SEKSI PMD	2	1	3
6	SEKSI PELAYANAN UMUM	1	-	1
7	SEKSI TRANTIBUM	6	2	8
8	KELURAHAN KOTA BENGKALIS	3	3	6
9	KELURAHAN DAMON	4	6	10
10	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG	1	5	6
TOTAL		26	21	47

Sumber: PPUK Kec. Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 47 orang PNS dilingkungan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, 26 orang (55,31%) adalah laki-laki dan 21 orang (44,68%) adalah perempuan. Selain itu, juga diketahui bahwa sejumlah 25 orang PNS (53,19%) Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis bekerja pada Kantor Camat dan sisanya sejumlah 22 orang (46,80%) merupakan pegawai yang bertugas di Kelurahan Se-Kecamatan Bengkalis.

Tabel 2.1.2
Komposisi PNS Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1	CAMAT	-	-	-	1
2	SEKRETARIAT				
	- SEKCAM	-	-	1	-
	- PPUK	-	1	2	-
	- KEUANGAN	-	-	3	-
3	SEKSI TAPEM	-	2	2	-
4	SEKSI KESOSBUD	-	-	1	-
5	SEKSI PMD	-	-	3	-
6	SEKSI PELAYANAN UMUM	-	-	1	-
7	SEKSI TRANTIBUM	-	3	5	-
8	KELURAHAN KOTA BENGKALIS	-	1	5	-
9	KELURAHAN DAMON	-	4	6	-
10	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG	-	1	5	-
TOTAL		0	12	34	1

Sumber: PPUK Kec. Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan III mencapai 34 orang atau 72,34% dan golongan II mencapai 12 orang atau 25,53%, sedangkan Golongan IV hanya sejumlah 1 orang atau 2,12%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan

oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.1.2

Komposisi PNS Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon/Peta Jabatan

NO	UNIT KERJA	ESELON			
		II	III	IV	JMLH
1	CAMAT	-	1	-	1
2	SEKRETARIAT				
	- SEKCAM	-	1	-	1
	- PPUK	-	-	1	1
	- KEUANGAN	-	-	1	1
3	SEKSI TAPEM	-	-	1	1
4	SEKSI KESOSBUD	-	-	1	1
5	SEKSI PMD	-	-	1	1
6	SEKSI PELAYANAN UMUM	-	-	1	1
7	SEKSI TRANTIBUM	-	-	1	1
8	KELURAHAN KOTA BENGKALIS	-	-	4	4
9	KELURAHAN DAMON	-	-	5	5
10	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG	-	-	4	4
TOTAL		0	2	20	22

Sumber: PPUK Kec. Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 22 jabatan eselon terdiri dari 2 (dua) eselon III dan 20 (dua puluh) eselon IV di lingkungan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.1.2

Komposisi PNS Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1	CAMAT	1	-	-	-	-
2	SEKRETARIAT					
	- SEKCAM	-	1	-	-	-
	- PPUK	1	-	-	2	-
	- KEUANGAN	-	3	-	-	-

3	SEKSI TAPEM	1		-	3	-
4	SEKSI KESOSBUD	-	1	-	-	-
5	SEKSI PMD	1	1	-	1	-
6	SEKSI PELAYANAN UMUM	-	1		-	
7	SEKSI TRANTIBUM	-	1	-	7	-
8	KELURAHAN KOTA BENGKALIS	1	2	1	2	-
9	KELURAHAN DAMON	1	2	-	7	-
10	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG	1	3	-	2	-
TOTAL		7	15	1	24	

Sumber: PPUK Kec. Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan SMA sampai dengan S1 yaitu sejumlah 40 orang atau sebesar 85,10%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan Bengkalis.

Tabel 2.1.2
Daftar aset yang dimiliki oleh Kecamatan Bengkalis

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Ruangan Camat						
1	Kursi Hadap U	2	2	-	-	
2	Meja Direktur	1	1	-	-	
3	Kursi Kerja Direktur	1	1	-	-	
4	Lemari	1	1	-	-	
5	AC	2	2	-	-	
6	Gambar Presiden	1	1	-	-	
7	Gambar Wakil Presiden	1	1	-	-	
8	Lambang Garuda	1	1	-	-	
9	Telepon	1	1	-	-	
10	Sofa	2 Set	2 Set	-	-	
11	Kulkas	1	1	-	-	
12	Dispenser	1	1	-	-	
13	Lemari Dapur	1	1	-	-	
14	Televisi	1	1	-	-	
15	Meja Rapat Bentuk Oval	1	1	-	-	
16	Kursi Rapat	10	10	-	-	
		28	28			
Ruangan Sekretaris Kecamatan						
1	Meja Kerja Direktur	1	1	-	-	
2	Kursi Kerja Direktur	1	1	-	-	
3	Telepon	1	1	-	-	
4	Jam Dinding	1	1	-	-	
5	Ac	1	1	-	-	
6	Printer	1	1	-	-	
7	Sofa	1	1	-	-	
8	HT	1	1	-	-	
9	Komputer	1	1	-	-	
10	Kursi Sandaran Rendah	1	1	-	-	
		10	10			
Ruangan Penyusunan Program						
1	Lemari Arsip	1	1	-	-	
2	Meja Kerja	2	2	-	-	
3	Filing Kabinet	1	1	-	-	
4	Lemari Arsip	2	2	-	-	
5	Meja Komputer	1	1	-	-	
6	Komputer	1	1	-	-	
7	Kursi Sandaran Tinggi	1	1	-	-	
8	Lemari Arsip	1	1	-	-	
9	Mesin Ketik	1	1	-	-	

10	Lemari Dapur	1	1	-	-	
11	Filling Kabinet	2	2			
12	Meja Kerja ½ Biro	1	1	-	-	
13	Sepeda Motor	1	1	-	-	
14	Kursi Sandaran Tinggi	2	2	-	-	
15	Meja Kerja ½ Biro	4	4	-	-	
16	Note Book	1	1	-	-	
17	Note Book	1	1	-	-	
18	Komputer	2	2	-	-	
19	Komputer	1	1	-	-	
20	Sound System	1	1	-	-	
21	Lemari Kaca Kecil	1	1	-	-	
22	Note Book	1	1	-	-	
23	Meja Staf	1	1	-	-	
24	Meja Direktorat	1	1	-	-	
25	NoteBook	1	1	-	-	
26	Dispenser	1	1	-	-	
		34	34			
Ruangan Keuangan dan Perlengkapan						
1	Lemari	1	1	-	-	
2	Meja Komputer	1	1	-	-	
3	Kursi Sandaran Rendah	2	2	-	-	
4	Kursi Sandaran Tinggi	1	1	-	-	
5	Lemari	1	1	-	-	
6	Mesin Fotocopy	1	1	-	-	
7	Meja Kerja	1	1	-	-	
8	Meja Direktorat	1	1	-	-	
9	Kursi Kerja Direktorat	1	1	-	-	
10	Meja Direktorat	1	1	-	-	
11	Meja Kerja	2	2	-	-	
12	Lemari Arsip	3	3	-	-	
13	Kulkas	1	1	-	-	
14	Meja Kerja	1	1	-	-	
15	Dispenser	1	1	-	-	
16	Lemari Arsip	1	1	-	-	
17	Note Book	2	2	-	-	
18	Mesin Tik	1	1	-	-	
19	Printer	1	1	-	-	
20	Note Book	1	1	-	-	
21	Komputer	1	1	-	-	
22	Note Book	1	1	-	-	
23	Note Book	1	1	-	-	
24	AC	2	2	-	-	
25	Note Book	1	1	-	-	
26	Note Book	1	1	-	-	
27	Printer	1	1	-	-	

28	Dispenser	1	1	-	-	
29	Note Book	1	1	-	-	
30	Penghancur Kertas	1	1	-	-	
		36	36			
Ruangan Tata Pemerintahan						
1	Lemari Kaca	1	1	-	-	
2	Filing Kabinet	2	2	-	-	
3	Kursi Sandaran Sedang	1	1	-	-	
4	Kursi Sandaran Tinggi	1	1	-	-	
5	Meja Komputer	2	2	-	-	
6	Meja Komputer	1	1	-	-	
7	Stabilizier	1	1	-	-	
8	Ac	1	1	-	-	
9	Lemari Arsip	2	2	-	-	
10	Meja Kerja	1	1	-	-	
11	Meja Kerja	2	2	-	-	
12	Komputer	1	1	-	-	
13	Kursi Putar Sandaran Rendah	3	3	-	-	
14	Lemari Arsip	1	1	-	-	
15	Meja Kerja 1 Biro	1	1	-	-	
16	Kursi Sandaran Tinggi	1	1	-	-	
17	Televisi	1	1	-	-	
18	Mesin TIK	1	1	-	-	
19	Note Book	1	1	-	-	
20	Komputer	1	1	-	-	
21	Printer	2	2	-	-	
22	AC	1	1	-	-	
		29	29			
Ruangan Pelayanan Umum						
1	Lemari Besi	3	3	-	-	
2	Kursi Hadap U	5	5	-	-	
3	Meja Makan	1	1	-	-	
4	Kipas Angin	2	2	-	-	
5	Jam Dinding	1	1	-	-	
6	Kursi Hadap U	1	1	-	-	
7	Meja Kerja	1	1	-	-	
8	Lemari Arsip	2	2	-	-	
9	Telepon	1	1	-	-	
10	Meja Komputer	1	1	-	-	
11	Komputer	1	1	-	-	
12	Lemari Arsip	1	1	-	-	
13	Meja Komputer	1	1	-	-	
14	Meja Kerja 1 Biro	1	1	-	-	
15	Meja Kerja ½ Biro	2	2	-	-	
16	Kursi Sandaran Tinggi	1	1	-	-	
17	Kursi Putar Sandaran Rendah	1	1	-	-	

18	Komputer	1	1	-	-	
19	TV	1	1	-	-	
20	Studio Visual/Tulisan Paten	1	1	-	-	
21	Kursi Ruang Tunggu	½ Set	½ Set	-	-	
22	Tong Sampah	1	1	-	-	
23	Kursi Sofa Ruang Menyusui	1 Unit	1	-	-	
24	Tempat Koran	2 Unit	1	-	-	
25	Kursi Makan	1 Set	1	-	-	
26	Permainan Anak-Anak	1 Set	1	-	-	
27	Lemari Kaca	1	1	-	-	
		37	37			
Ruangan Kesosbud						
1	Meja Direktur	1	1	-	-	
2	Kursi Sandaran Tinggi	1	1	-	-	
3	Kursi Sandaran Sedang	2	2	-	-	
4	Meja Komputer	2	1	1	-	
5	Meja Kerja	4	4	4	-	
6	Dispenser	1	1	-	-	
7	Kursi Sandaran Tinggi	2	2	-	-	
8	Lemari Arsip	2	2	-	-	
9	Meja Komputer	1	1	-	-	
10	Meja Kerja 1 Biro	1	1	-	-	
11	Kursi Sandaran Tinggi	2	2	-	-	
12	Kursi Sandaran Sedang	1	1	-	-	
13	Komputer	1	1	-	-	
14	Note Book	1	1	-	-	
15	Ac	1	1	1	-	
16	Ac	1	1	-	-	
17	Meja Kantor	1	1	-	-	
18	Komputer	1	1	1	-	
19	Ac	1	1	-	-	
		27	27	7		
Ruangan Trantibum						
1	Mesin TIK	1	1	-	-	
2	Kursi Hadap U	2	2	-	-	
3	Filing Kabinet	1	1	-	-	
4	Kursi Sandaran Rendah	4	4	-	-	
5	Meja Komputer	1	1	-	-	
6	Kursi Putar Sandaran Tinggi	1	1	-	-	
7	Meja Kerja	1	1	-	-	
8	Meja Kerja	1	1	-	-	
9	Kursi Sandaran Rendah	1	1	-	-	
10	Komputer	1	1	-	-	
11	Filing Kabinet	1	1	-	-	
12	Ac	1	1	-	-	
13	Lemari Arsip	2	2	-	-	

14	Telepon	1	1	-	-	
15	Kursi Putar Sandaran Tinggi	1	1	-	-	
16	Meja Kerja	2	2	-	-	
17	Meja Komputer	1	1	-	-	
18	Komputer	1	1	-	-	
19	Ac	1	1	-	-	
20	Kursi Sandaran Rendah	1	1	-	-	
21	Kalkulator	1	1	-	-	
22	Lemari Arsip	1	1	-	-	
23	HT	4	4	-	-	
24	Meja Kerja	2	2	-	-	
25	Meja Kerja	1	1	-	-	
26	Kursi Sandaran Rendah	2	2	-	-	
27	Kursi Sandaran Tinggi	1	1	-	-	
28	Printer	1	1	-	-	
29	Grobak	1	1	-	-	
30	Printer	1	1	-	-	
		41	41	-	-	
	AULA					
1	Meja Kerja	2	2			
2	Kursi Hadap U	32	32			
3	Speaker BMB	2	2			
4	Amplify	1 set	1 set			
5	Kaki Speaker	2	2			
6	Meja Rapat	1	1			
7	Meja Panjang	2	2			
8	Kursu Hadap U	19	19			
9	Kursi Sandaran Tinggi	4	4			
10	Kursi Rapat	60	60			
11	AC	3	3			
		127	127			
Total		369	369	7	-	

Sumber: Subbag Keuangan dan Perlengkapan Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Tahun 2025.

Tabel di atas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis berupa kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 274 aset di lingkungan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dari total tersebut, 264 aset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 96,35%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif RenstraPD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

a. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah.

Capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.3
Capaian dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bengkalis 2021-2025

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,85	89%	90	91	94	84,85	87,48	91,62	91,62	94,06

2	Persentase Kelurahan/Desa dengan Kinerja Baik	45,16 %	75%	80%	80%	-	45,16 %	80%	83%	83%	-
3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	80%	82%	85%	85%	-	12%	85%	85%	48%	-
4	Predikat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	-		BB	BB	BB	-

Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 adalah 84,85, dengan target renstra sebesar 89%. Dalam realisasi capaian tahunan, indeks ini meningkat secara bertahap, mencapai 94,06 pada tahun 2025. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja pemerintah kecamatan terhadap kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2021, hanya 45,16% kelurahan/desa yang mencapai kinerja baik. Namun, realisasi capaian tahunan menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 83% pada tahun 2024. Ini menunjukkan peningkatan kinerja di tingkat kelurahan/desa.

Persentase penurunan gangguan Kamtibmas pada tahun 2021 adalah 12%, dengan target renstra sebesar 80%. Realisasi capaian tahunan menunjukkan penurunan gangguan Kamtibmas mencapai 48% pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan efektivitas dalam mengelola gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2021-2025 adalah sejumlah **Rp. 34.378.123.025** (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) atau sebesar **90,82%** dari dana yang tersedia dalam DPPA yaitu

sejumlah **Rp. 37.852.832.969** (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Bengkalis
Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2021	7.349.836.977	6.725.346.907	91,50
2	2022	7.556.655.377	6.723.031.245	88,97
3	2023	7.948.827.802	7.328.833.138	92,20
4	2024	7.622.757.293	6.879.480.272	90,25
5	2025	7.374.755.520	6.721.431.463	91,14
Jumlah		37.852.832.969	34.378.123.025	90,82

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Pegawai sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai **Rp. 3.474.709.944** (tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Untuk Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Bengkalis adalah seluruh Masyarakat 28 Desa dan 3 Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Bengkalis. Sebagai pendukung terlaksananya tujuan Perangkat Daerah, Kecamatan Bengkalis memiliki mitra pendukung, antara lain:

- Seluruh Kepala Desa dan Lurah beserta Jajarannya se Kecamatan Pelaihari;
- Kepala Satuan Polisi Sektor (Kapolsek) Bengkalis Beserta Seluruh Anggota;
- Komandan Rayon Militer (Danramil) Wilayah Kecamatan Bengkalis;
- Seluruh SKPD Lintas Sektor dan UPT yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis.

2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah "**Pelayanan Publik yang Belum Prima**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa pelayanan publik belum optimal. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Permasalahan dalam Pelayanan.

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- a. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan.

- b. Letak geografis masyarakat sebagai daerah kepulauan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan.
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal.
- e. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.
- f. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan.
- g. Masih adanya konflik masyarakat.
- h. Masih adanya konflik batas administrasi.
- i. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- j. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan.

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Bengkalis lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya.

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis pada Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Bengkalis

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Permasalahan Dalam Pelayanan	1. Belum Optimalnya Tatakelola Pemerintahan yang Adaptif, Efisien, dan Terintegrasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas	Pelayanan Publik yang Belum Prima

Bab ini Memberikan Gambaran
Tentang Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan
Perangkat Daerah

III

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Kecamatan Bengkalis yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029 dengan tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam Misi II RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pelayanan pada Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Renstra Kecamatan Bengkalis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan sangat erat dalam mewujudkan reformasi birokrasi

serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Target Lima Tahun Mendatang					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu	Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	94	95,5	96	97	98,5	99

Sumber : RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2025-2029 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024. Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 adalah:

”Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia”

Sementara untuk mencapai visi yang dinyatakan secara tegas dan jelas sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat demi kemajuan daerah. Atas dasar itu misi Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut:

- Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.
- Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
- Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Visi Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029, maka setiap SKPD harus mendukung program-program prioritas tersebut dari rangkaian program sesuai urusan wajib dari SKPD terkait. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Kecamatan Bengkalis melaksanakan program-program untuk mewujudkan misi kedua Kabupaten Bengkalis yaitu: **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter”**.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif,

strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 2025 – 2029

Visi RPJMD		Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia	
Misi 2		Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan NilaiNilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.	
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Integritas, Dinamis, dan Masyarakat Berkarakter Dengan Penguatan Nilai Agama dan Budaya Melayu	Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan Akuntabel	Penyempurnaan Layanan Publik	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Berbasis pada Kepuasan Masyarakat dan Meningkatkan Efisiensi Pelayanan.
			Penggunaan Teknologi untuk Mempercepat Proses Administrasi dan Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Sumber : RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan strategis Kecamatan Bengkalis adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan standard pelayanan publik
- Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis kepuasan masyarakat dan efisiensi pelayanan.

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

B A B

IV

Bab ini Memberikan Gambaran
Tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Perangkat Daerah Selama Lima Tahun

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program Kegiatan pada Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bengkalis.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2025-2029, selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
7.01	Kecamatan Bengkalis		100%	100%	17.445.662.743	100%	20.773.346.228	100%	20.979.990.961	100%	21.269.948.539	100%	21.417.149.209	100%	21.666.000.657	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	10.103.402.845	100%	12.363.556.337	100%	12.389.720.814	100%	12.551.609.571	100%	12.627.472.144	100%	12.819.692.362	Kecamatan Bengkalis
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	1.756.314.173	100%	2.011.673.978	100%	2.141.545.609	100%	2.223.763.067	100%	2.279.151.558	100%	2.296.755.113	Kecamatan Bengkalis
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Keterpenuhan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100%	100%	5.331.403.723	100%	6.106.564.704	100%	6.120.101.335	100%	6.163.616.140	100%	6.169.000.432	100%	6.205.980.818	Kecamatan Bengkalis
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Keterpenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	34.980.000	100%	40.065.927	100%	40.117.119	100%	40.402.357	100%	40.422.501	100%	40.664.816	Kecamatan Bengkalis
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	128.960.722	100%	147.711.003	100%	184.599.213	100%	185.911.740	100%	186.004.434	100%	187.119.447	Kecamatan Bengkalis
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Keterpenuhan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	90.601.280	100%	103.774.279	100%	103.906.871	100%	104.645.664	100%	115.098.140	100%	115.788.101	Kecamatan Bengkalis

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkulu

NORMA, STANDAR, DAN PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN		TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	OUTCOME PROGRAM	OUTPUT KEGIATAN	OUTPUT SUB KEGIATAN	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										CATAT AN	
										2025	2026		2027		2028		2029		2030		
										TARG ET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
(1)		(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
												20.773.3 46.228		20.979.9 90.961		21.269.9 48.539		21.417.1 49.209		21.666.0 00.657	
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan Akuntable		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Integritas, Dinamis, dan Masyarakat Berkarakter Dengan Penguatan Nilai Agama dan Budaya Melayu	Meningkat nya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	83,65%	100%	100%	12.363.5 56.337	100%	12.389.7 20.814	100%	12.551.6 09.571	100%	12.627.4 72.144	100%	12.819.6 92.362	
				Persentase Keterpenuhi an Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhi an Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87,58%	100%	100%	181.435. 880	100%	181.435. 880	100%	181.435. 880	100%	181.435. 880	100%	181.435. 880	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan yang Disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94,89%	3 Doku men	3 Doku men	74.685.9 60	3 Dokume n	74.685.96 0	3 Doku men	74.685.96 0	3 Doku men	74.685.96 0	3 Doku men	74.685.9 60	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Tersusun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97,52%	8 Lapora n	8 Lapora n	91.124.9 20	8 Laporan	91.124.92 0	8 Lapor an	91.124.92 0	8 Lapor an	91.124.92 0	8 Lapor an	91.124.9 20	

				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Profil dan Monografi yang Disusun	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00%	2 Laporan	2 Laporan	15.625.000	2 Laporan	15.625.000	2 Laporan	15.625.000	2 Laporan	15.625.000			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90,25%	100%	100%	9.295.976.400	100%	9.322.140.877	100%	9.484.029.634	100%	9.559.892.207	100%	9.752.112.425	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90,25%	65 Orang / Bulan	65 Orang / Bulan	9.280.794.400	65 Orang / Bulan	9.306.958.877	65 Orang / Bulan	9.468.847.634	65 Orang / Bulan	9.544.710.207	65 Orang / Bulan	9.736.930.425	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	-	15 Laporan	15 Laporan	15.182.000	15 Laporan	15.182.000	15 Laporan	15.182.000	15 Laporan	15.182.000	15 Laporan	15.182.000	
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	91,67%	100%	100%	307.200.000	100%	307.200.000	100%	307.200.000	100%	307.200.000	100%	307.200.000	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah			Jumlah Jasa Tenaga Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	91,67%	14 Orang	14 Orang	307.200.000	14 Orang	307.200.000	14 Orang	307.200.000	14 Orang	307.200.000	14 Orang	307.200.000	
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19,98%	100%	100%	223.104.000	100%	223.104.000	100%	223.104.000	100%	223.104.000	100%	223.104.000	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	19,98%	35 Orang	35 Orang	223.104.000	35 Orang	223.104.000	35 Orang	223.104.000	35 Orang	223.104.000	35 Orang	223.104.000	

				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah		Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	69,16%	100%	100%	882.941.578	100%	882.941.578	100%	882.941.578	100%	882.941.578	100%	882.941.578	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	86,81%	17 Paket	17 Paket	24.619.087	17 Paket	24.619.087	17 Paket	24.619.087	17 Paket	24.619.087	17 Paket	24.619.087	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,98%	30 Paket	30 Paket	137.621.991	30 Paket	137.621.991	30 Paket	137.621.991	30 Paket	137.621.991	30 Paket	137.621.991	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65,39%	3 Paket	3 Paket	137.750.000	3 Paket	137.750.000	3 Paket	137.750.000	3 Paket	137.750.000	3 Paket	137.750.000	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73,24%	10 Paket	10 Paket	135.450.500	10 Paket	135.450.500	10 Paket	135.450.500	10 Paket	135.450.500	10 Paket	135.450.500	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52,48%	2 Dokumen	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	27.000.000	2 Dokumen	27.000.000	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,99%	100 Laporan	100 Laporan	400.500.000	100 Laporan	400.500.000	100 Laporan	400.500.000	100 Laporan	400.500.000	100 Laporan	400.500.000	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	
				Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54,99%	100%	100%	171.000.000	100%	171.000.000	100%	171.000.000	100%	171.000.000	100%	171.000.000	

				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	-	1 Unit	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	52,82%	7 Paket	7 Paket	30.000.000	7 Paket	30.000.000	7 Paket	30.000.000	7 Paket	30.000.000	7 Paket	30.000.000	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,57%	8 Unit	8 Unit	49.000.000	8 Unit	49.000.000	8 Unit	49.000.000	8 Unit	49.000.000	8 Unit	49.000.000	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00 %	5 Unit	5 Unit	52.000.000	5 Unit	52.000.000	5 Unit	52.000.000	5 Unit	52.000.000	5 Unit	52.000.000	
				Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78,93%	100%	100%	531.668.479	100%	531.668.479	100%	531.668.479	100%	531.668.479	100%	531.668.479	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	91,48%	180 Laporan	180 Laporan	160.487.535	180 Laporan	160.487.535	180 Laporan	160.487.535	180 Laporan	160.487.535	180 Laporan	160.487.535	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Internet Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72,56%	15 Laporan	15 Laporan	342.667.824	15 Laporan	342.667.824	15 Laporan	342.667.824	15 Laporan	342.667.824	15 Laporan	342.667.824	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Jumlah Tenaga Outsourcing yang Dibayar Jaminan Kesehatan, JKK dan JKM; Jumlah Jasa Tenaga Pengemudi Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85,43%	3 Laporan	3 Laporan	28.513.120	3 Laporan	28.513.120	3 Laporan	28.513.120	3 Laporan	28.513.120	3 Laporan	28.513.120	

				Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,93%	100%	100%	770.230.000	100%	770.230.000	100%	770.230.000	100%	770.230.000	100%	770.230.000	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dilakukan Perawatan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77,82%	20 Unit	20 Unit	216.480.000	20 Unit	216.480.000	20 Unit	216.480.000	20 Unit	216.480.000	20 Unit	216.480.000	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara;	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79,87%	55 Unit	55 Unit		55 Unit		55 Unit		55 Unit	55 Unit			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Jumlah Tenaga Kebersihan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91,67%	15 Orang	15 Orang	288.000.000	15 Orang	288.000.000	15 Orang	288.000.000	15 Orang	288.000.000	15 Orang	288.000.000	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara; Jumlah Gedung dan Fasilitas Umum yang Dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38,12%	55 Unit	55 Unit	265.750.000	55 Unit	265.750.000	55 Unit	265.750.000	55 Unit	265.750.000	55 Unit	265.750.000	
				Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	66,03%	100%	100%	2.011.673.978	100%	2.141.545.609	100%	2.223.763.067	100%	2.279.151.558	100%	2.296.755.113	
				Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40,08%	100%	100%	826.677.467	100%	956.549.098	100%	973.306.547	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	

				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40,08%	8 Dokumen	8 Dokumen	826.677.467	8 Dokumen	956.549.098	8 Dokumen	973.306.547	8 Dokumen	1.000.000.000	8 Dokumen	1.000.000.000	
				Persentase Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Persentase Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	79,76%	100%	100%	471.500.000	100%	471.500.000	100%	495.000.000	100%	510.500.000	100%	510.500.000	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79,76%	2 Laporan	2 Laporan	471.500.000	2 Laporan	471.500.000	2 Laporan	495.000.000	2 Laporan	510.500.000	2 Laporan	510.500.000	
				Persentase Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100,00 %	100%	100%	43.039.991	100%	43.039.991	100%	65.000.000	100%	70.195.038	100%	70.195.038	
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100,00 %	200 Dokumen	200 Dokumen	43.039.991	200 Dokumen	43.039.991	200 Dokumen	65.000.000	200 Dokumen	70.195.038	200 Dokumen	70.195.038	
				Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 %	100%	100%	670.456.520	100%	670.456.520	100%	690.456.520	100%	698.456.520	100%	716.060.075	

				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	670.456.520	1 Laporan	670.456.520	1 Laporan	690.456.520	1 Laporan	698.456.520	1 Laporan	716.060.075	
				Persentase Keterpenuhihan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Keterpenuhihan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	68,78%	100%	100%	6.106.564.704	100%	6.120.101.335	100%	6.163.616.140	100%	6.169.000.432	100%	6.205.980.818	
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00 %	100%	100%	482.755.482	100%	496.292.113	100%	539.806.918	100%	545.191.210	100%	582.171.596	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	482.755.482	1 Kegiatan	496.292.113	1 Kegiatan	539.806.918	1 Kegiatan	545.191.210	1 Kegiatan	582.171.596	
				Persentase Terwujudnya Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Terwujudnya Pemberdayaan Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	66,14%	100%	100%	5.350.000.000	100%	5.350.000.000	100%	5.350.000.000	100%	5.350.000.000	100%	5.350.000.000	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dilaksanakan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	57,30%	3 Laporan	3 Laporan	600.000.000	3 Laporan	600.000.000	3 Laporan	600.000.000	3 Laporan	600.000.000	3 Laporan	600.000.000	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dilaksanakan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67,41%	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	4.750.000.000	3 Pokmas/Ormas	4.750.000.000	3 Pokmas/Ormas	4.750.000.000	3 Pokmas/Ormas	4.750.000.000	3 Pokmas/Ormas	4.750.000.000	

				Persentase Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	54,58%	100%	100%	273.809.222	100%	273.809.222	100%	273.809.222	100%	273.809.222	100%	273.809.222	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	54,58%	620 Keluar ga	620 Keluar ga	273.809.222	620 Keluarga	273.809.222	620 Keluar ga	273.809.222	620 Keluar ga	273.809.222	620 Keluar ga	273.809.222	
				Persentase Keterpenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Keterpenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	92,78%	100%	100%	40.065.927	100%	40.117.119	100%	40.402.357	100%	40.422.501	100%	40.664.816	
				Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83,17%	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Frekuensi Pelaksanaan Operasi Pekat di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	83,17%	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	
				Persentase Terwujudnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Terwujudnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100,00 %	100%	100%	20.065.927	100%	20.117.119	100%	20.402.357	100%	20.422.501	100%	20.664.816	

				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Frekuensi Pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	20.065.927	1 Laporan	20.117.119	1 Laporan	20.402.357	1 Laporan	20.422.501	1 Laporan	20.664.816	
				Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	27,77%	100%	100%	147.711.003	100%	184.599.213	100%	185.911.740	100%	186.004.434	100%	187.119.447	
				Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27,77%	100%	100%	147.711.003	100%	184.599.213	100%	185.911.740	100%	186.004.434	100%	187.119.447	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Trantibum	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00%	50 Orang	50 Orang	20.000.000	50 Orang	20.000.000	50 Orang	21.312.527	50 Orang	21.312.527	50 Orang	21.312.527	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Partisipan yang Memeriahkan Rangkaian Acara dan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100,00 %	1000 Orang	1000 Orang	112.171.003	1000 Orang	149.059.213	1000 Orang	149.059.213	1000 Orang	149.151.907	1000 Orang	150.266.920	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Frekuensi Pemantauan & Penyelesaian Isu-Isu Trantibum di Wilayah Kecamatan Bengkalis	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21,03%	4 Dokumen	4 Dokumen	15.540.000	4 Dokumen	15.540.000	4 Dokumen	15.540.000	4 Dokumen	15.540.000	4 Dokumen	15.540.000	

				Persentase Keterpenuhihan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Keterpenuhihan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00 %	100%	100%	103.774.279	100%	103.906.871	100%	104.645.664	100%	115.098.140	100%	115.788.101	
				Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00 %	100%	100%	103.774.279	100%	103.906.871	100%	104.645.664	100%	115.098.140	100%	115.788.101	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Frekuensi Dilakukannya Pembinaan Administrasi Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,00 %	28 Dokumen	28 Dokumen	63.781.740	28 Dokumen	63.781.740	28 Dokumen	63.781.740	28 Dokumen	69.234.216	28 Dokumen	69.924.177	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			Frekuensi Dilakukannya APB Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100,00 %	28 Dokumen	28 Dokumen	39.992.539	28 Dokumen	40.125.131	28 Dokumen	40.863.924	28 Dokumen	45.863.924	28 Dokumen	45.863.924	



Bengkalis, 01 Mei 2025

CAMAT BENGKALIS,

TAUFIK HIDAYAT, S.STP., MPA
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19821205 200212 1 001

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab dan Lokasi Kegiatan
Renstra Kantor Kecamatan Bengkalis Tahun 2025-2029 Berdasarkan Permendagri 90/2019
Program Unggulan Kepala Daerah (1 Milyar 1 Kecamatan)

KODE REKENING	NAMA PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	LOKASI	2025		2026		2027		2028		2029		AKHIR RPJMD	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15
	Kecamatan		%	Kecamatan Bengkalis	100%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	100%	20.000.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan / Orang	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			

	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Orang	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100%	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Media	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Orang/Kali	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tahun	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat/Orang	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Orang	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	Kecamatan Bengkalis	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	5.000.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	Kecamatan Bengkalis	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	5.000.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	Kecamatan Bengkalis	8 Kegiatan	1.000.000.000	8 Kegiatan	1.000.000.000	8 Kegiatan	1.000.000.000	8 Kegiatan	1.000.000.000	8 Kegiatan	1.000.000.000	100%	5.000.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Orang/Usulan	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Keterpenuhan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	%	Kecamatan Bengkalis	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	15.000.000.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terwujudnya Pemberdayaan Kelurahan	%	Kecamatan Bengkalis	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	15.000.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan	Kecamatan Bengkalis	3 Kelurahan	600.000.000	3 Kelurahan	600.000.000	3 Kelurahan	600.000.000	3 Kelurahan	600.000.000	3 Kelurahan	600.000.000	100%	3.000.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Kecamatan Bengkalis	3 Kelurahan	2.400.000.000	3 Kelurahan	2.400.000.000	3 Kelurahan	2.400.000.000	3 Kelurahan	2.400.000.000	3 Kelurahan	2.400.000.000	100%	12.000.000.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kegiatan	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Keterpenuhihan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terwujudnya Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Keterpenuhihan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Kegiatan	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	Kecamatan Bengkalis	0		0		0		0		0			

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Keterpenuhihan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	Kecamatan Bengkalis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Bengkalis, 01 Mei 2025

CAMAT BENGKALIS,

TAUFIK HIDAYAT, S.STP., MPA

PEMBINA TK.I

NIP. 19821205 200212 1 001

4.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Selengkapnya target-target capaian kinerja Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis untuk periode 2025-2029 yang akan datang disajikan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Kecamatan Bengkalis yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029

Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir (2030)
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	94	94	95,5	96	97	98,5	99

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 4.2 tersebut, terdapat 1 (satu) indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan untuk Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Indikator Persentase Keterpenuhan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan Indikator Persentase Keterpenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Indikator Persentase Keterpenuhan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Bab ini Memberikan Gambaran
Tentang Kesimpulan Renstra Perangkat Daerah
dan Kaidah Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Daerah

V

Rencana Strategis Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Kecamatan Bengkalis sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Bengkalis, 01 Mei 2025

CAMAT BENGKALIS,



TAUFIK HIDAYAT, S.STP., MPA
PEMBINA TK.I

NIP. 19821205 200212 1 001